

ANALISIS EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2011-2015

Marelis Suhud Gustaf¹

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara FISIP Unmul
Alamat Korespondensi : suhud88msg@gmail.com

Abstract

This article aim to describe and evaluate the Program Medium Term Development of Education in West Kutai. The results showed that the medium-term development program in education in West Kutai in terms of the effectiveness of that activity carried out effectively enough for the planned program had been implemented and completed. Viewed from in terms of efficiency that the programs implemented are not efficient because it uses a substantial budget.

Keyword : Evaluation, Program of Education, West Kutai

Abstrak

Tulisan ini mencoba untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Pendidikan di Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembangunan jangka menengah daerah bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat dipandang dari segi efektivitas bahwa kegiatan yang dilaksanakan cukup efektif karena program yang direncanakan telah dilaksanakan dan selesai.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Pendidikan, Kabupaten Kutai Barat

Pendahuluan

Kabupaten Kutai Barat adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam dan sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sektor tambang batubara dan perkebunan karet. Pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik menjadi prioritas utama. Tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat terus meningkat serta daya beli masyarakat tinggi yang menjurus pada perilaku konsumtif. Akan tetapi di balik semua itu, kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kutai Barat masih rendah. Di bidang pendidikan masih dijumpai sejumlah masalah seperti : (1) masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam bersekolah. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas yang bersekolah hanya mencapai 25,12 % di tahun 2009 yang lebih sedikit lebih baik dibanding tahun 2004 yaitu 24,01%; (2) Masih rendahnya angka melek huruf walaupun telah terjadi perbaikan dalam lima tahun terakhir dan masih rendahnya rata-rata lama bersekolah bagi anak usia sekolah.

Banyak pemuda-pemudi yang menikah di usia dini dengan pendidikan terakhir lulusan Sekolah Menengah Atas bahkan ada yang hanya berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama tanpa ada keinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Program yang telah dilaksanakan masih belum bisa menjawab beberapa permasalahan yang berkenaan dengan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Kutai

Barat . Perlu dilakukan evaluasi terhadap program pemerintah tersebut agar dapat ditemukan strategi yang tepat untuk mewujudkan masyarakat kutai barat yang cerdas dan produktif.

Kerangka Teori

Evaluasi dan Kriteria Dampak Kebijakan

Menurut O.Jones (1994:357), evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan semua proses pemerintahan. Ia bervariasi dalam spesifikasi criteria, teknik pengukuran, metode analisis, dan bentuk rekomendasi. Spesifikasi mengacu pada identifikasi tujuan-tujuan serta kriteria yang harus dievaluasi. Pengumpulan mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan dan analisis adalah penerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna penyusunan kesimpulan.

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Lester dan Stewart (Winarno,2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda,tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau criteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terdapat enam kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik. Menurut William N.Dunn (2003:429-438) terdapat enam kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik yaitu :

- a. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna.
- b. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai, Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal
- c. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh

- alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
- d. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.
 - e. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
 - f. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Menurut Sugiyono (2007:1) Penelitian Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan periode Tahun 2011 s.d. 2015

Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu indikator atau kriteria yang dikembangkan oleh Dunn (2003) untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan dan Indikator yang digunakan adalah apakah hasil yang ingin dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan bidang pendidikan seperti yang telah di paparkan di atas, diketahui bahwa selama tahun anggaran 2011 s/d 2015, penyerapan anggaran dengan persentase 88 %. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan rutin seperti pelaksanaan ujian sekolah, pelatihan untuk para guru dan Pembayaran Beasiswa. Selain dari pada itu terdapat kegiatan

pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah untuk sekolah yang mengalami kerusakan atau sekolah yang membutuhkan tambahan fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Seluruh program kegiatan yang sifatnya rutin telah dilaksanakan dan program pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah telah selesai dibangun. Dapat dikatakan bahwa pencapaian yang telah dicapai sesuai dengan target yang ingin dicapai, hal tersebut tercermin dengan telah terlaksananya aktifitas belajar mengajar seluruh sekolah, Ujian sekolah, Pelatihan Bagi Guru-Guru serta monitoring dilakukan dinas pendidikan ke sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dan telah selesainya pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah.

Efisiensi

Program pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat khususnya untuk program kegiatan yang dapat langsung dirasakan oleh sekolah mulai tahun 2014 terus mengalami pengurangan anggaran sedangkan total alokasi anggaran masih tetap berada di angka 200 miliar rupiah. Adanya ketimpangan dalam pembagian anggaran per kegiatan, sehingga menyebabkan kurang efisiennya pelaksanaan program.

Kecukupan

Berdasarkan hasil evaluasi dari segi kecukupan, bahwa pemberian dana bantuan untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah masih belum merata di 16 kecamatan. Program pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah hanya terpusat di Kecamatan Linggang Bigung dan Kecamatan Barong Tongkok. Mencermati hasil wawancara dengan narasumber AS. Selaku Pengawas TK, SD, SMP dan SMA di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, hal tersebut membuktikan bahwa adanya pilih kasih dalam pemberian dana bantuan untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah. Dari hasil observasi mengenai kecukupan yang berkenaan dengan jumlah kecamatan yang memperoleh bantuan dana pendidikan untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah dapat dikatakan masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perataan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perataan diketahui adanya klasifikasi dalam pemberian bantuan dana pendidikan untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah. Setiap permohonan yang diajukan oleh tiap sekolah akan ditindaklanjuti dengan observasi lapangan oleh Dinas Pendidikan, yang apabila sekolah tersebut telah memenuhi klasifikasi maka akan diseleksi kembali. Sekolah yang terpilih adalah sekolah dianggap paling rusak.

Jika mencermati klasifikasi yang digunakan untuk Dinas Kabupaten Kutai Barat, maka sekolah-sekolah yang dalam kondisi rusak dapat tertanggulangi. Akan tetapi pada kenyataannya berbeda dengan hasil

penelitian di lapangan, berdasarkan hasil wawancara di kecamatan Mook Manaar Bulatn menyebutkan bahwa pemerintah kurang memperhatikan pembangunan fasilitas sekolah yang ada di Kecamatan Mook Manaar Bulatn sehingga kualitas SDM di daerah tersebut sangat jelek.

Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan wawancara kembali kepada Narasumber TL selaku Kabid. Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa salah dasar pemberian bantuan adalah laporan rutin dari tiap sekolah ke dinas pendidikan. Pemerintah mengalami kesulitan dalam pemberian bantuan karena pihak sekolah jarang memberikan laporan, terutama sekolah yang berada di daerah terpencil. Dinas pendidikan mengakui ketidakmampuannya untuk menjangkau seluruh sekolah yang ada di wilayah kabupaten Kutai Barat karena keterbatasan anggaran.

Dari uraian pembahasan mengenai perataan yang berkenaan dengan adanya klasifikasi dalam penentuan penerima dan dana bantuan pendidikan untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah di tiap kecamatan tidak optimal karena dinas pendidikan tidak memiliki data yang akurat sehingga pemberian bantuan menjadi tidak tepat sasaran dan tidak merata.

Responsivitas

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap responsivitas diketahui bahwa terdapat kecamatan kecamatan yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Hal tersebut dibenarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kecamatan Mook Manaar Bulatn oleh Narasumber AD, selaku Pengawas TK,SD,SMP dan SMA di Kecamatan Mook Manaar Bulatn yang menyebutkan bahwa sebagian besar guru yang mengajar hanya berijazahkan paket, di tambah lagi dengan kurangnya buku, meja dan kursi serta gedung sekolah rusak, sehingga kualitas murid masih jauh dibawah standar.

Berbeda halnya jika dibandingkan dengan sekolah yang berada di daerah pusat pemerintahan, tidak terdapat banyak masalah yang berat sebab aktivitas sekolah dapat diawasi langsung oleh Dinas pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, capaian program pembangunan bidang pendidikan di kabupaten Kutai Barat dapat dikatakan belum mampu memecahkan permasalahan.

Ketepatan

Fasilitas sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Mook Manaar Bulan sangat tidak memadai, selain kekurangan meja dan kursi serta buku-buku pelajaran, guru-guru yang mengajar murid di tingkat sekolah dasar hanya berijazahkan paket. Perlu adanya perbaikan dalam kebijakan pemberian dana bantuan untuk pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah. Pendistribusian bantuan akan lebih baik jika diberikan secara merata, tanpa didasarkan tingkatan kerusakan, tapi didasarkan jatah per kecamatan.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan periode Tahun 2011-2015

Penggunaan Anggaran Tidak Efisien

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat periode 2011 s.d 2015. Peneliti melihat hambatan itu berasal dari Dinas Pendidikan Kutai Barat.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa anggaran sangat minim akan tetapi peneliti melihat anggaran yang di alokasikan untuk bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat cukup besar. Setelah Dicermati, ternyata anggaran yang di alokasikan untuk pengadaan dan pembangunan fasilitas sekolah hanya 25% dari total anggaran bidang pendidikan pada tahun 2013, pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan, padahal anggaran bidang pendidikan masih berkisar di 200 miliar rupiah. Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk pengadaan dan pembangunan fasilitas sekolah hanya 2,8 % dari total anggaran bidang pendidikan di Kabupaten Kutai Barat yang berada pada angka 200 miliar rupiah.

Melihat hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa tidak optimalnya pelaksanaan program pembangunan daerah Kab. Kutai Barat bidang pendidikan periode 2011 s.d 2015 disebabkan manajemen anggaran yang kurang baik.

Data-Data Tidak Akurat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti mengalami kesulitan dalam pengumpulan data mengenai kondisi sekolah yang ada di wilayah Kab. Kutai Barat. Beberapa Kecamatan yang di tetapkan sebagai sampel tidak mampu memberikan data terperinci terkait kondisi sekolah yang ada di daerahnya masing –masing. Bahkan, Dinas Pendidikan juga tidak memiliki data yang akurat terkait kondisi seluruh sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis di Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat menyebutkan bahwa data-data terkait kondisi sekolah hanya diperoleh berdasarkan laporan yang di sampaikan pihak sekolah. Dinas Pendidikan jarang melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mendokumentasikan sekolah yang dalam kondisi rusak. Dinas pendidikan cukup mengalami kesulitan dalam pemberian bantuan karena minimnya data sehingga penentuan penerima dana bantuan pembangunan dan pengadaan fasilitas sekolah tidak didasarkan klasifikasi yang jelas .

Melihat hal tersebut, penulis berkesimpulan bahwa tidak optimalnya pelaksanaan program pembangunan daerah Kab. Kutai Barat bidang pendidikan periode 2011 s.d 2015 disebabkan tidak tersedianya data yang akurat untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan program dapat dikatakan Efektif dilihat dari telah terlaksananya seluruh Kegiatan yang telah direncanakan
- b. Pelaksanaan Program dikatakan tidak efisien karena dalam pelaksanaan program menghabiskan anggaran yang cukup besar .
- c. Pelaksanaan Program dapat dikatakan belum memenuhi kriteria Kecukupan karena belum dapat memenuhi kebutuhan kecamatan yang berada di daerah terpencil, hanya terpusat di beberapa kecamatan saja,
- d. Pelaksanaan Program dapat dikatakan belum sesuai dengan kriteria perataan karena pembangunan di bidang pendidikan tidak merata di seluruh kecamatan di sebabkan klasifikasi yang ditetapkan untuk pemberian bantuan dana pendidikan tidak di dasarkan data yang akurat.
- e. Pelaksanaan Program dapat dikatakan belum memenuhi kriteria Responsivitas karena belum dapat menyelesaikan permasalahan di bidang pendidikan
- f. Pelaksanaan Program dapat dikatakan belum memenuhi kriteria Ketepatan karena Terdapat kekeliruan dalam penetapan penerima dana bantuan pembangunan dan pengadaan fasilitas bagi sekolah sehingga belum bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dipandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran di Dinas Pendidikan agar alokasi anggaran per program lebih merata sehingga mampu mengakomodir kebutuhan sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Dikarenakan tidak tersedianya data yang akurat mengenai kondisi seluruh sekolah di Kabupaten Kutai Barat, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dipandang perlu untuk memrintahkan kepada seluruh sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat untuk melaporkan kondisi sekolahnya secara terperinci dan rutin agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam merencanakan program pembangunan bidang pendidikan pada tahun anggaran selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2004. UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Citra Umbara: Bandung.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. P.T. Radja Grafindo Persada. Jakarta.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.